

## **Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen RPKD di Kabupaten Nagan Raya**

**Sailal Arimi<sup>1\*</sup>, Syarifah Rahmiza Muzana<sup>2</sup>, Yasrizal<sup>3</sup>, Mahrizal<sup>4</sup>, Harmaini<sup>5</sup>, Hartini<sup>6</sup>, Muzakkir<sup>7</sup>, Said Mahdani<sup>8</sup>**

<sup>1\*,3,4,5,6,8</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Abulyatama

<sup>7</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>✉</sup>

Email [sailalarimi@utu.ac.id](mailto:sailalarimi@utu.ac.id), [syarifahrahmiza\\_fisika@abulyatama.ac.id](mailto:syarifahrahmiza_fisika@abulyatama.ac.id), [yasrizal@utu.ac.id](mailto:yasrizal@utu.ac.id), [mahrizal@utu.ac.id](mailto:mahrizal@utu.ac.id), [harmaini@utu.ac.id](mailto:harmaini@utu.ac.id), [hartini@utu.ac.id](mailto:hartini@utu.ac.id), [muzakkir@utu.ac.id](mailto:muzakkir@utu.ac.id), [saidmahdani@utu.ac.id](mailto:saidmahdani@utu.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

#### **Histori Artikel:**

*Diterima* 12-06-2026

*Disetujui* 17-06-2026

*Diterbitkan* 19-06-2026

#### **Katakunci:**

*tata kelola; kemiskinan; pendampingan; RPKD; Kabupaten Nagan Raya*

### **ABSTRAK**

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya, yang di-tunjukkan oleh tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Provinsi Aceh dan nasional. Kondisi ini memerlukan upaya penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan berbasis data. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 sebagai instrumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan dan analisis situasi, Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi pemangku kepentingan, pendampingan penyusunan dokumen, serta validasi dan finalisasi dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pendampingan berhasil menghasilkan Dokumen RPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang memuat profil kemiskinan daerah, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemanfaatan data dalam proses perencanaan, dan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan daerah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan data dalam proses perencanaan, dan penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Nagan Raya.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang paling menyita perhatian berbagai negara di dunia. Meskipun selama beberapa dekade terakhir upaya pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, prevalensi kemiskinan di berbagai negara hingga saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Statistik kemiskinan dunia terbaru menunjukkan bahwa hampir 700 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem (World Bank, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya penghapusan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas pembangunan pada masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam agenda pembangunan. bahkan keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lagi ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (United Nations, 2023; Roy et al., 2018).

Indonesia juga masih menghadapi tantangan kemiskinan yang serupa, meskipun tingkat kemiskinan nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, disparitas kemiskinan antara desa dengan kota masih sangat tinggi di Indonesia, selain itu, capaian penurunan kemiskinan tersebut belum merata antar wilayah, sebagian daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat, sementara daerah lainnya masih menghadapi laju penurunan kemiskinan yang relatif lambat (Huda *et al.*, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional tahun 2025 sebesar 8,47 persen. Sementara pada tingkat regional, di tahun yang sama provinsi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya masih mencatat tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di tingkat daerah memerlukan upaya yang lebih serius terutama melalui penguatan tatakelola penanggulangan kemiskinan seperti perencanaan yang terukur, kebijakan dan program yang lebih efektif, terintegrasi dan berkelanjutan (Kwon & Kim, 2014; Tebaldi & Mohan, 2010)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2025 mencapai 15,42 persen, angka tersebut menempatkan Kabupaten Nagan Raya pada kelompok kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh, yaitu berada pada peringkat ke-8 dari 23 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen nyata dari pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang ada saat ini. Meskipun demikian, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 19,34 persen berhasil diturunkan menjadi 17,38 persen pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 15,42 persen pada tahun 2025.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini. Menurut Kwon & Kim, (2014) ada korelasi yang sangat kuat antara implementasi *good governance* dengan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Tata kelola yang baik memungkinkan terbangunnya koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dan perencanaan sering menyebabkan program berjalan secara sektoral, tumpang tindih, serta kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara komprehensif (World Bank, 2004; UNDP, 2022).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah perlu memiliki dokumen perencanaan yang mampu mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan pembangunan ke dalam satu kerangka yang terarah. Salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, RPKD merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Penyusunan RPKD memerlukan dukungan data yang memadai, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah secara tepat. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan teknis, penyediaan analisis ilmiah, serta fasilitasi proses perencanaan berbasis data dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi, (2021) tentang prinsip *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan dokumen RPKD yang berbasis data dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang mampu menjadi pedoman dalam percepatan penurunan kemiskinan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya.

## **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory assistance*) yang menempatkan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan para pemangku kepentingan sebagai mitra utama dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui proses identifikasi permasalahan, konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pendampingan teknis penyusunan dokumen, serta validasi dan finalisasi dokumen RPKD. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar di atas menunjukkan tahapan pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif. Proses dimulai dari identifikasi permasalahan dan analisis situasi, dilanjutkan dengan FGD dan konsultasi pemangku kepentingan, pendampingan penyusunan dokumen, serta validasi dan finalisasi dokumen hingga menghasilkan Dokumen RPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 sebagai pedoman perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah. Tahapan dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

**a. Tahap 1. Identifikasi Permasalahan dan Analisis Situasi**

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan identifikasi kondisi kemiskinan Kabupaten Nagan Raya melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), P3KE, dokumen RPJMD, RKPD, serta berbagai dokumen perencanaan dan laporan pembangunan daerah lainnya. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik kemiskinan, perkembangan indikator kemiskinan, kelompok sasaran, serta berbagai permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah

**b. Tahap 2. Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi**

Tahap selanjutnya dilakukan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kegiatan ini melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, BPS, serta perangkat daerah terkait lainnya. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menyusun prioritas program, serta membangun kesepahaman mengenai arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

### **c. Tahap 3. Pendampingan Penyusunan Dokumen RPKD**

Pada tahap ini tim pengabdian memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Pendampingan dilakukan melalui penyusunan profil kemiskinan daerah, analisis kondisi eksisting, perumusan isu strategis, penyusunan tujuan dan sasaran, penetapan target indikator kinerja, serta penyusunan program dan kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan. Tahap ini merupakan inti kegiatan pengabdian karena menghasilkan rancangan dokumen RPKD yang akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah *evidence-based planning* dengan memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.

### **d. Tahap 4. Validasi dan Finalisasi Dokumen**

Tahap akhir dilakukan melalui proses validasi dan penyempurnaan dokumen bersama seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen RPKD yang disusun telah sesuai dengan kondisi daerah, kebijakan nasional, RPJMD Kabupaten Nagan Raya, serta kebutuhan masyarakat. Luaran utama dari tahap ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Identifikasi Permasalahan dan Analisis Situasi**

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan analisis situasi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kemiskinan daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Analisis dilakukan menggunakan berbagai sumber data sekunder, antara lain data Badan Pusat Statistik (BPS), P3KE, RPJMD Kabupaten Nagan Raya, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2025 masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 15,42 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 13,23 persen dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Selain itu, Kabupaten Nagan Raya menempati urutan ke-8 tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan prioritas yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, laju penurunannya masih relatif lambat. Di sisi lain, terdapat konsentrasi kemiskinan yang cukup tinggi pada beberapa wilayah tertentu yang umumnya merupakan wilayah perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih memerlukan strategi yang lebih terarah dan berbasis karakteristik wilayah (Huda et al., 2020; UNDP, 2022).

## **2. Hasil Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Pemangku Kepentingan**

Tahap selanjutnya dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), rapat koordinasi, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah terkait lainnya. Melalui kegiatan FGD dan konsultasi tersebut diperoleh berbagai masukan mengenai permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah mengenai arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akan dituangkan dalam dokumen RPKD.

Pelaksanaan FGD memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki kesempatan untuk menyampaikan program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan sehingga dapat diidentifikasi peluang integrasi program antar sektor. Dengan demikian, penyusunan RPKD tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Berikut dilampirkan foto kegiatan



**Gambar 2. Kegiatan kegiatan FGD dan dan konsultasi lintas perangkat daerah**



**Gambar 3. Kegiatan kegiatan FGD dan dan konsultasi lintas perangkat daerah**

Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi lintas perangkat daerah yang menjadi bagian dari proses penyusunan RPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi, serta menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

### **3. Hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen RPKD**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, tim pengabdian selanjutnya melakukan pendampingan teknis penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Pendampingan dilakukan secara intensif bersama Bappeda Kabupaten Nagan Raya dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Kegiatan pendampingan meliputi penyusunan profil kemiskinan daerah, identifikasi isu strategis, penyusunan tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan, serta perumusan program dan kegiatan prioritas. Dalam proses ini digunakan pendekatan berbasis data (*evidence-based planning*) sehingga setiap rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Salah satu hasil penting dari kegiatan pendampingan ini adalah tersusunnya kerangka *Theory of Change* yang menggambarkan hubungan antara permasalahan kemiskinan, strategi intervensi, program prioritas, serta target hasil yang ingin dicapai. Pendekatan ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.

Selain itu, dokumen RPKD yang disusun juga memuat berbagai strategi prioritas yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, serta penguatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.



**Gambar 4.** Theory of Change (ToC) atau alur penyusunan RPKD Kab. Nagan Raya Tahun 2025-2029

Gambar di atas menampilkan alur perubahan (*Theory of Change*) kegiatan pendampingan penyusunan RPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan yang didukung oleh data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan dokumen RPKD yang berkualitas serta memperkuat efektivitas tata kelola kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

#### 4. Hasil Validasi dan Finalisasi Dokumen RPKD

Setelah proses penyusunan dokumen selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah validasi dan finalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian pembahasan bersama Bappeda, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta perangkat daerah terkait untuk memastikan kesesuaian substansi dokumen dengan kondisi daerah, kebijakan nasional, RPJMD Kabupaten Nagan Raya, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Proses validasi menghasilkan berbagai penyempurnaan terhadap profil kemiskinan daerah, rumusan isu strategis, target indikator kinerja, program prioritas, serta arah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui tahapan ini diperoleh kesepahaman antar perangkat daerah mengenai tujuan, sasaran, dan strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan. Kegiatan validasi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing perangkat daerah. Hasil akhir dari tahapan ini adalah tersusunnya Dokumen RPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang telah memperoleh persetujuan teknis dari para pemangku kepentingan terkait dan siap digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif perencanaan, tetapi juga memiliki legitimasi dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya.

Tahap validasi dan finalisasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa dokumen RPKD yang disusun tidak hanya memenuhi kaidah teknis perencanaan, tetapi juga memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan di daerah serta memperoleh kesepahaman dan dukungan dari berbagai perangkat daerah yang terlibat. Melalui proses ini, berbagai masukan dan penyempurnaan yang muncul selama pembahasan dapat diakomodasi sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan siap digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. berikut dilampirkan foto dokumen RPKD Kabupaten Nagan Raya



**Gambar 5.** Sampul Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029

Gambar di atas menunjukkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang dihasilkan melalui proses pendampingan dan telah melalui tahapan validasi serta finalisasi bersama pemangku kepentingan terkait.

### **5. Implikasi Kegiatan Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan**

Kegiatan pendampingan penyusunan RPKD Kabupaten Nagan Raya tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Melalui proses identifikasi masalah, konsultasi, koordinasi lintas sektor, serta penyusunan dokumen berbasis data, kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini mendorong meningkatnya sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan berbagai pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam proses perencanaan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan RPKD tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 telah berhasil dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi permasalahan dan analisis situasi, Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi pemangku kepentingan, pendampingan penyusunan dokumen RPKD, serta validasi dan finalisasi dokumen. Melalui tahapan tersebut diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan daerah sekaligus berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan pendampingan menghasilkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 yang disusun secara partisipatif dan berbasis data. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta target penanggulangan kemiskinan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain menghasilkan dokumen perencanaan, kegiatan ini juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pendampingan penyusunan RPKD dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

---

## DAFTAR PUSATAKA

- Huda, C. N., Ningrum, R. D., Armintasari, F., Herawati, Ramdlaningrum, H., Sagala, M., Thaariq, R. M., & Kartika, W. (2020). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015–2018*. Perkumpulan PRAKARSA. <https://theprakarsa.org>
- Roy, J., et al. (2018). Sustainable development, poverty eradication and reducing inequalities. In V. Masson-Delmotte et al. (Eds.), *Global warming of 1.5°C: An IPCC special report on global warming of 1.5°C*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-5/>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15(1), e0227176. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Tebaldi, E., & Mohan, R. (2010). Institutions and Poverty. *Journal of Development Studies*, 46(6), 1047–1066. <https://doi.org/10.1080/00220380903012730>
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals report 2023: Special edition*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- Kwon, H.-j. and Kim, E. (2014), Poverty Reduction and Good Governance: Examining the Rationale of the Millennium Development Goals. *Development and Change*, 45: 353-375. <https://doi.org/10.1111/dech.12084>
- United Nations Development Programme. (2022). *Governance for people and planet*. UNDP. <https://www.undp.org>
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5986>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2021). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance & Management Review*, 44(6), 1319–1343. <https://doi.org/10.1080/15309576.2021.1907928>